



Warga Tolak Kompensasi KAI

Tetap Tinggali 14 Rumah Dinas di Lempuyangan

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Perluasan Stasiun Lempuyangan dengan menggeser 14 warga yang menempati eks rumah dinas di selatan Jalan Lempuyangan masih tak jelas. Sebanyak 14 warga menolak kompensasi dari PT Kereta Api Indonesia dan bebungah dari Keraton Yogyakarta.

Ketua RW 01 Bausasran Anton Handriutomo menjelaskan, Kamis (15/5/2025) lalu, di kantor

Kelurahan Bausasran, ada pertemuan antara warga Lempuyangan dengan PT KAI dan Keraton Yogyakarta.

"Iya, soal kompensasi itu. Isinya bangunan (di luar bangunan utama), (tambahan rumah) singgah Rp 10 juta, (ongkos angkut) Bongkar Rp 2,5 juta," jelas Anton, kemarin (18/5/2025).

Kemudian, Anton menambahkan, Keraton Yogyakarta turut memberikan tambahan berupa bebungah kepada 14 warga. Nilainya, sebesar Rp 750 juta total untuk semua warga terdampak atau Rp 53,7 juta tiap rumah.

■ Baca **WARGA...** Hal II



NORMAL: Warga beraktivitas di sekitar kawasan Lempuyangan, Yogyakarta.

Warga Tolak Kompensasi KAI

sambungan dari hal Joglo Jogja

"Untuk dari keraton akan memberikan bebungah Rp 750 juta untuk 14 rumah, atau per rumah Rp 53,7 juta," jelas Anton.

Atas semua tawaran tersebut, lanjut Anton, warga hanya menerima bebungah dari Keraton Yogyakarta. Mereka malah bersyukur, Keraton memberikan bebungah cukup besar kepada 14 warga.

"Warga tidak mempermasalahkan bebungah, justru kita malah heran kenapa Keraton begitu perhatian pada kita. Yang kita masalahkan itu kompensasi KAI-nya, karena yang

akan pakai KAI. Kalau Sultan *kan* yang punya tanah, nggak ada hubungannya langsung dengan kita," katanya.

Anton menegaskan, atas tawaran dari PT KAI itu, pihaknya dalam pertemuan menolak 14 warga masih bersikukuh untuk menolak pindah dan menolak tawaran dari PT KAI.

KKayak kita tidak dihargai, bayangkan bangunan (di luar bangunan inti) yang permanen cuma dinilai Rp 250 ribu (per meter persegi). Itu buat beli material aja nggak cukup. Kalau bangun itu sekarang *kan* se-

kitar Rp 2 (juta)-Rp 3 juta per meter persegi *to*," ungkapnya.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan, sosialisasi ini adalah langkah lanjutan dari sosialisasi yang kami dilakukan sebelumnya. Terkait penolakan warga, pihaknya akan membahas lebih lanjut.

"Kami sudah menyampaikan sosialisasi kepada warga bahwa ada semacam ongkos bongkar. Namun, warga tetap menolak, karena bahasanya sudah menolak maka kami akan bahas di internal untuk langkah apa

yang akan kami ambil," ujarnya.

Feni menjelaskan, setelah tawaran dalam sosialisasi itu ditolak warga, pihaknya akan membahas terlebih dahulu dengan internal PT KAI. Baru, pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya.

"Intinya, kami telah menerima aspirasi dan masukan dari warga dan akan menjadi pembahasan internal untuk langkah selanjutnya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan karena hasil pembahasan hari ini akan kami tindak lanjuti dulu di internal," imbuh Feni. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005